

**Peran Gender dalam Pemberdayaan Agribisnis Masyarakat Desa**

**La Harudin<sup>1\*</sup>, La Panga<sup>2</sup>, Nurmaya<sup>3</sup>, Haerudin Tao<sup>4</sup>**

<sup>1234</sup> Program Studi Agribisnis, Universitas Sulawesi Tenggara

\*Author Correspondence. Email : [laharudin98@gmail.com](mailto:laharudin98@gmail.com)

<i>Informasi Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p><b>Kata Kunci:</b> Gender, Agribisnis, Pemberdayaan, Masyarakat Desa, Pembangunan Berkelanjutan</p> <p><b>Article history:</b> Submitted: 27-05-25 Final Revised: 17-06-25 Accepted: 29-06-25 Published: 01-07-25</p>	<p>Pemberdayaan agribisnis masyarakat desa merupakan strategi penting dalam pembangunan ekonomi pedesaan yang berkelanjutan. Dalam proses ini, aspek gender menjadi komponen krusial yang seringkali terabaikan, padahal peran laki-laki dan perempuan memiliki kontribusi yang saling melengkapi dalam seluruh rantai agribisnis, mulai dari produksi hingga pemasaran. Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran gender dalam pemberdayaan agribisnis masyarakat desa berdasarkan analisis literatur yang relevan. Metode yang digunakan adalah studi literatur sistematis terhadap jurnal, artikel, dan laporan penelitian yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam agribisnis masih menghadapi berbagai tantangan seperti akses terbatas terhadap sumber daya, pelatihan, dan pengambilan keputusan. Namun demikian, perempuan juga memiliki potensi besar dalam inovasi, pengelolaan hasil pertanian, dan membangun jaringan usaha mikro agribisnis. Pemberdayaan gender dalam agribisnis tidak hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga petani, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan lokal dan kesejahteraan komunitas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemberdayaan yang inklusif dan sensitif gender dalam program-program agribisnis desa. Kajian ini merekomendasikan integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agribisnis berbasis komunitas sebagai langkah strategis dalam pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan adil.</p>
<i>Article Info</i>	<i>Abstract</i>
<p><b>Keywords:</b> Gender, Agribusiness, Empowerment, Rural Communities, Sustainable Development</p> <p><b>Article history:</b> Submitted: 27-05-25 Final Revised: 17-06-25 Accepted: 29-06-25 Published: 01-07-25</p>	<p><i>Empowering rural agribusiness is a crucial strategy for sustainable rural economic development. In this process, gender is a crucial component that is often overlooked, even though the roles of men and women complement each other throughout the agribusiness chain, from production to marketing. This study aims to in-depth examine the role of gender in rural agribusiness empowerment based on an analysis of relevant literature. The method used was a systematic literature review of journals, articles, and research reports published in the last ten years. The study results indicate that women's involvement in agribusiness still faces various challenges, such as limited access to resources, training, and decision-making. However, women also have significant potential in innovation, agricultural product management, and building agribusiness micro-enterprise networks. Gender empowerment in agribusiness not only increases household income but also strengthens local food security and community well-being. Therefore, an inclusive and gender-sensitive empowerment approach is needed in village agribusiness programs. This study recommends integrating a gender perspective into the planning and implementation of community-based agribusiness activities as a strategic step towards sustainable and equitable agricultural development.</i></p>

## 1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat desa melalui agribisnis telah menjadi pendekatan strategis dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang. Agribisnis tidak hanya dipandang sebagai sektor ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan sosial yang melibatkan komunitas lokal dalam rantai produksi hingga distribusi hasil pertanian. Di dalam sistem agribisnis ini, peran gender memainkan peranan kunci yang belum sepenuhnya diakui secara struktural, meskipun kontribusi perempuan cukup besar dalam aktivitas pertanian dan pascapanen (Fischer & Qaim, 2022). Ketimpangan gender dalam konteks ini menjadi hambatan besar dalam menciptakan sistem agribisnis yang inklusif dan adil.

Studi-studi internasional menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontribusi signifikan dalam agribisnis, terutama dalam kegiatan pengolahan hasil, manajemen rumah tangga pertanian, dan pengambilan keputusan ekonomi tingkat mikro. Namun demikian, partisipasi mereka masih sangat dibatasi oleh norma sosial, keterbatasan akses terhadap sumber daya, serta minimnya representasi dalam kelembagaan pertanian (Beuchelt & Badstue, 2021). Di berbagai wilayah pedesaan di Asia dan Afrika, perempuan seringkali memiliki tanggung jawab kerja yang sama atau lebih besar dibanding laki-laki, namun tidak memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan agribisnis.

Menurut Doss et al. (2021), ketimpangan gender dalam akses terhadap lahan, modal, pelatihan, dan teknologi pertanian menjadi akar struktural dari marginalisasi perempuan dalam agribisnis. Ketimpangan ini juga berdampak pada rendahnya produktivitas sektor pertanian secara keseluruhan. Kajian mereka menyimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan dalam agribisnis akan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, memperluas akses pasar, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi desa. Oleh karena itu, penting bagi program-program pemberdayaan berbasis agribisnis untuk memasukkan perspektif gender dalam setiap tahapan perencanaannya.

Dalam konteks transformasi agraria global, pemberdayaan perempuan dalam agribisnis telah dipandang sebagai kunci keberhasilan pembangunan inklusif. Seperti dikemukakan oleh Meinzen-Dick et al. (2022) perempuan yang memperoleh pelatihan kewirausahaan dan akses terhadap jaringan pasar mampu membentuk usaha pertanian keluarga yang lebih tangguh terhadap krisis, termasuk pandemi dan perubahan iklim. Hal ini memperlihatkan bahwa strategi pemberdayaan gender tidak hanya berfungsi sebagai alat keadilan sosial, tetapi juga sebagai pendekatan ekonomi berbasis ketahanan

komunitas.

Pemberdayaan perempuan dalam agribisnis juga berkaitan erat dengan struktur kelembagaan lokal. Banyak studi menunjukkan bahwa perempuan cenderung kurang terwakili dalam kelompok tani, koperasi agribisnis, dan lembaga keuangan mikro. Sebuah riset oleh Ragasa dan Lambrecht (2021) menemukan bahwa reformasi kelembagaan yang lebih inklusif terhadap perempuan dapat mendorong partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan dan manajemen usaha tani. Tanpa perubahan kelembagaan, perempuan tetap terpinggirkan meskipun program-program pemberdayaan telah dilaksanakan.

Selain itu, tantangan baru muncul dalam era digitalisasi dan teknologi pertanian. Akses perempuan terhadap teknologi pertanian modern masih terbatas, baik karena kurangnya literasi digital maupun karena distribusi teknologi yang tidak merata. Tavenner et al. (2022) mencatat bahwa meskipun ada peningkatan pelatihan digital untuk petani perempuan, kesenjangan gender tetap terjadi karena norma budaya dan kendala domestik. Oleh karena itu, program digitalisasi pertanian harus disertai dengan pendekatan yang responsif terhadap konteks sosial dan kebutuhan perempuan.

Di sisi lain, pemberdayaan perempuan dalam agribisnis membawa dampak positif yang luas, terutama dalam aspek sosial. Perempuan yang berdaya secara ekonomi melalui agribisnis lebih mampu mengelola pendapatan keluarga, menyekolahkan anak, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial desa. Hal ini menunjukkan adanya efek ganda (*multiplier effect*) dari pemberdayaan perempuan terhadap kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan (Agarwal & Carr, 2023). Maka dari itu, investasi dalam pemberdayaan gender di sektor agribisnis adalah investasi jangka panjang dalam kesejahteraan sosial.

Penting juga untuk menyoroti bahwa pendekatan satu arah (*top-down*) dalam pemberdayaan seringkali tidak efektif. Program pemberdayaan yang tidak mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, dan peran sosial perempuan cenderung gagal mencapai targetnya. Seperti yang dikemukakan oleh Farnworth & Colverson (2021), pendekatan partisipatif dan berbasis pengalaman perempuan lebih efektif dalam meningkatkan hasil dan keberlanjutan program agribisnis. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan harus dirancang secara kontekstual dan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

Pemerintah dan lembaga internasional memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan agribisnis berbasis desa mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan gender. Perlu adanya kebijakan afirmatif

yang menjamin akses perempuan terhadap sumber daya agribisnis, pelatihan kepemimpinan, serta jaminan sosial dan perlindungan kerja. Sebagaimana disampaikan oleh Quisumbing & Meinzen-Dick (2023), peran regulasi dalam mendukung inklusi perempuan tidak hanya meningkatkan keadilan sosial, tetapi juga memperkuat struktur agribisnis yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini bertujuan untuk menelaah peran gender, khususnya perempuan, dalam pemberdayaan agribisnis masyarakat desa melalui pendekatan studi literatur terhadap penelitian-penelitian internasional terbaru. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi bentuk partisipasi perempuan, hambatan yang mereka hadapi, serta strategi pemberdayaan yang telah terbukti efektif di berbagai konteks global. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam merancang program pemberdayaan agribisnis berbasis gender yang lebih inklusif dan berdaya guna.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Pemberdayaan gender dalam sektor agribisnis telah menjadi topik penting dalam literatur pembangunan pedesaan modern. Menurut Mulyani dan Sari (2023) pemberdayaan perempuan di sektor pertanian tidak hanya berfokus pada peningkatan produktivitas, tetapi juga pada penguatan kapasitas pengambilan keputusan dan akses terhadap sumber daya. Perempuan sering kali berperan ganda, baik sebagai pengelola usaha tani maupun sebagai penopang ekonomi rumah tangga, sehingga kontribusinya terhadap keberlanjutan agribisnis sangat signifikan. Hal ini menuntut adanya strategi khusus yang mampu mengakomodasi kebutuhan dan potensi perempuan secara optimal.

Dalam konteks global, Rahman et al. (2023) menekankan bahwa kesenjangan gender di sektor agribisnis sebagian besar disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap modal, teknologi, dan pasar. Ketimpangan ini diperburuk oleh norma sosial yang membatasi ruang gerak perempuan dalam ranah ekonomi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui pelatihan keterampilan, akses pembiayaan, dan jejaring usaha dapat meningkatkan kemandirian ekonomi serta memperluas peluang usaha mereka. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif yang melibatkan perempuan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program agribisnis menjadi sangat penting.

Selain itu, literatur terkini menggarisbawahi bahwa inovasi teknologi dapat menjadi katalis dalam pemberdayaan perempuan di sektor agribisnis. Menurut Fitriani dan Nugroho (2024) pemanfaatan teknologi digital seperti platform pemasaran online, aplikasi penyuluhan berbasis ponsel, dan sistem informasi harga pasar mampu

mempermudah perempuan dalam mengakses pasar yang lebih luas. Teknologi juga memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk, sehingga daya saing agribisnis yang dikelola perempuan dapat meningkat secara signifikan. Namun, akses teknologi tetap memerlukan dukungan pelatihan dan pendampingan agar benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Di sisi lain, pendekatan berbasis komunitas juga menjadi faktor kunci dalam pemberdayaan gender di sektor agribisnis. Menurut Susanti (2024) pembentukan kelompok tani perempuan atau koperasi berbasis gender dapat menjadi wadah untuk saling berbagi pengetahuan, memperkuat posisi tawar, serta memfasilitasi akses ke sumber daya dan pasar. Kelompok ini juga dapat berperan sebagai sarana advokasi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di sektor pertanian. Dengan adanya solidaritas dan dukungan kolektif, perempuan menjadi lebih percaya diri untuk mengambil peran strategis dalam agribisnis.

Peran pemerintah dan lembaga pendukung tidak dapat diabaikan dalam literatur pemberdayaan gender di sektor agribisnis. Menurut Astuti et al. (2023) intervensi pemerintah melalui regulasi afirmatif, kebijakan akses modal yang setara, dan pelatihan berbasis gender mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keterlibatan perempuan secara maksimal. Lembaga swadaya masyarakat juga memiliki kontribusi besar dalam memberikan pendampingan teknis, akses jejaring pasar, serta penguatan kapasitas organisasi perempuan. Dengan kolaborasi multipihak, pemberdayaan gender dalam agribisnis dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

### **3. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur atau literature review yang bersifat kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih untuk mengkaji berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan mengenai peran gender dalam pemberdayaan agribisnis masyarakat desa. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, tren, serta gap penelitian yang ada, dengan fokus pada isu-isu struktural, sosial, dan ekonomi yang memengaruhi partisipasi gender dalam sektor agribisnis. Penelusuran sumber dilakukan secara sistematis melalui database akademik seperti Scopus, ScienceDirect, Taylor & Francis, dan Google Scholar.

Kriteria inklusi dalam pemilihan literatur mencakup artikel jurnal internasional bereputasi, laporan institusi riset, dan publikasi akademik yang terbit antara tahun 2018 hingga 2024. Literatur yang dianalisis harus secara eksplisit membahas hubungan antara gender dan agribisnis di tingkat komunitas desa atau rural. Artikel yang berfokus pada konteks urban, industri agribisnis skala besar tanpa aspek pemberdayaan, atau yang

tidak menyinggung isu gender secara signifikan, dieliminasi dari analisis. Total 30 artikel yang memenuhi kriteria dipilih untuk dianalisis secara tematik.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik content analysis, yaitu mengelompokkan hasil-hasil penelitian terdahulu ke dalam tema-tema utama seperti partisipasi perempuan dalam agribisnis, hambatan gender struktural, strategi pemberdayaan berbasis komunitas, serta intervensi kebijakan yang responsif gender. Proses analisis ini juga mencakup identifikasi persamaan, perbedaan, serta kontribusi setiap studi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika gender dalam pemberdayaan agribisnis masyarakat desa.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **a. Keterlibatan Perempuan dalam Rantai Nilai Agribisnis**

Keterlibatan perempuan dalam agribisnis tidak dapat dipandang sebelah mata. Perempuan berperan secara aktif dalam seluruh tahapan rantai nilai agribisnis, mulai dari produksi di tingkat hulu hingga pengolahan dan distribusi hasil pertanian di tingkat hilir. Di banyak komunitas pedesaan, mereka bertanggung jawab atas pekerjaan seperti menanam, menyiram, memanen, membersihkan, dan menyimpan hasil tani, serta sering kali mengelola kegiatan pascapanen seperti pengolahan makanan atau penjualan hasil panen ke pasar lokal. Namun, meskipun kontribusi mereka signifikan, perempuan jarang memperoleh pengakuan yang setara dengan laki-laki, terutama dalam hal kepemilikan lahan, akses terhadap sumber daya produktif, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan (FAO, 2023). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan gender yang bersifat struktural, di mana sistem agribisnis lebih mengakomodasi peran laki-laki sebagai aktor utama dalam pembangunan pertanian.

Penelitian terbaru oleh Doss et al. (2022) menyoroti bahwa ketidaksetaraan gender dalam akses terhadap input pertanian, seperti pupuk, benih unggul, alat pertanian modern, dan pelatihan teknis, merupakan salah satu hambatan utama yang mengurangi efisiensi dan produktivitas agribisnis yang dikelola perempuan. Dalam konteks negara berkembang, perempuan cenderung lebih sering bekerja di sektor informal agribisnis, seperti pengolahan hasil pertanian skala kecil, yang keuntungannya rendah dan akses pasarnya terbatas. Mereka juga menghadapi keterbatasan mobilitas dan hambatan sosial budaya yang membatasi partisipasi aktif mereka dalam kegiatan agribisnis komersial. Selain itu, dominasi laki-laki dalam organisasi petani dan koperasi juga membatasi peluang perempuan untuk mengakses informasi pasar, program subsidi, dan jaringan distribusi yang lebih luas

(Quisumbing et al., 2022). Ketimpangan ini memperlebar jurang kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan dalam sektor pertanian.

Meskipun demikian, ada indikasi positif dari berbagai inisiatif pemberdayaan berbasis gender yang mulai memperkuat posisi perempuan dalam rantai nilai agribisnis. Program-program seperti pelatihan kewirausahaan perempuan, akses modal mikro berbasis kelompok, serta kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat telah membuka ruang partisipasi perempuan secara lebih inklusif. Studi oleh Kristjanson et al. (2021) menunjukkan bahwa ketika perempuan diberikan akses yang setara terhadap sumber daya dan pelatihan, produktivitas agribisnis mereka meningkat signifikan, bahkan dalam beberapa kasus melampaui kinerja usaha tani yang dikelola laki-laki. Selain itu, integrasi teknologi digital seperti e-commerce pertanian dan aplikasi manajemen lahan berbasis gender terbukti mampu mengurangi hambatan geografis dan sosial yang selama ini membatasi perempuan. Oleh karena itu, penting untuk mendorong kebijakan publik yang bersifat afirmatif dan sensitif gender agar pemberdayaan perempuan dalam agribisnis tidak hanya menjadi jargon, tetapi juga nyata dalam praktik dan kebijakan pembangunan pedesaan.

#### **b. Hambatan Gender dalam Akses terhadap Sumber Daya**

Akses terhadap sumber daya produksi seperti lahan, modal, pelatihan, dan teknologi menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemberdayaan agribisnis masyarakat desa. Namun, perempuan masih mengalami keterbatasan yang signifikan dalam mengakses sumber daya tersebut. Hambatan ini muncul karena konstruksi sosial dan budaya yang masih memosisikan laki-laki sebagai pemilik utama aset produktif, sedangkan perempuan dianggap sebagai pelengkap atau tenaga bantu. Seperti yang diungkapkan oleh Doss et al. (2023) ketidaksetaraan kepemilikan dan kontrol atas lahan menjadi akar ketimpangan yang menyebabkan perempuan kurang terdorong untuk berinvestasi dalam peningkatan produktivitas agribisnis. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, perempuan sering kali mengakses lahan melalui relasi keluarga atau pernikahan, bukan sebagai pemilik langsung, sehingga membuat posisi mereka rentan secara ekonomi dan hukum.

Keterbatasan akses terhadap modal juga memperparah hambatan partisipasi perempuan dalam agribisnis. Lembaga keuangan cenderung mensyaratkan agunan berupa aset tetap seperti sertifikat tanah atau bangunan, yang sebagian besar tidak dimiliki oleh perempuan. Hal ini diperburuk oleh rendahnya literasi keuangan dan

minimnya keterlibatan perempuan dalam pelatihan manajemen usaha yang bersifat teknis maupun strategis. Menurut penelitian oleh Meinen-Dick et al. (2022) banyak program pembangunan pedesaan belum sepenuhnya mengintegrasikan pendekatan berbasis gender yang komprehensif, sehingga manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh laki-laki. Kesenjangan pelatihan dan teknologi ini juga menghambat perempuan untuk mengakses peluang peningkatan nilai tambah melalui inovasi pertanian, pengolahan produk, maupun pemasaran digital.

Norma sosial dan budaya yang masih patriarkis menjadi tantangan struktural yang tidak mudah diatasi. Dalam banyak komunitas pedesaan, perempuan masih dipandang sebagai penanggung jawab utama urusan domestik, sehingga waktu dan energi yang dapat mereka alokasikan untuk kegiatan agribisnis menjadi terbatas. Perempuan juga menghadapi tekanan sosial ketika mengambil peran publik, seperti menjadi pemimpin kelompok tani atau pengelola koperasi. Studi oleh Farnworth dan Colverson (2023) menunjukkan bahwa intervensi berbasis kebijakan yang tidak mempertimbangkan aspek kesetaraan gender justru memperkuat eksklusi perempuan dari rantai nilai pertanian. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi afirmatif yang tidak hanya membuka akses terhadap sumber daya, tetapi juga mendukung transformasi budaya melalui pendidikan, penguatan kapasitas, serta pelibatan laki-laki dalam mendorong kesetaraan gender di sektor agribisnis.

### **c. Strategi Pemberdayaan Berbasis Gender**

Pemberdayaan perempuan dalam agribisnis menuntut pendekatan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga struktur sosial dan budaya yang mempengaruhi partisipasi perempuan. Strategi pemberdayaan berbasis gender telah berkembang dengan mengadopsi model inklusif dan partisipatif, yang memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan usaha agribisnis. Pelatihan keterampilan teknis yang dirancang khusus bagi perempuan, seperti pelatihan pengolahan hasil tani, pemasaran digital, dan manajemen usaha mikro, terbukti meningkatkan kapasitas dan kepercayaan diri mereka untuk berwirausaha (Kebede et al., 2024). Intervensi semacam ini sangat penting karena selama ini perempuan cenderung dikesampingkan dalam pelatihan yang menyasar komunitas tani secara umum, yang seringkali lebih banyak diikuti oleh laki-laki.

Selain pelatihan, penguatan kelembagaan ekonomi seperti pembentukan koperasi perempuan menjadi strategi yang sangat signifikan. Koperasi perempuan tidak hanya berfungsi sebagai sarana akses modal dan pemasaran bersama, tetapi

juga sebagai wadah solidaritas sosial yang mampu memperkuat posisi tawar perempuan dalam komunitas agribisnis. Beberapa studi terbaru menunjukkan bahwa koperasi yang dipimpin dan dikelola oleh perempuan menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dalam distribusi hasil pertanian dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan anggotanya (Wanjiku & Njeri, 2023). Lebih dari itu, keberadaan koperasi perempuan juga memberi ruang kepada perempuan untuk menyuarkan kebutuhan spesifik mereka dalam perencanaan pembangunan desa berbasis pertanian.

Mentoring dan pendampingan usaha secara berkelanjutan juga menjadi strategi yang efektif dalam pemberdayaan perempuan di sektor agribisnis. Program mentoring yang menghubungkan perempuan pelaku usaha pemula dengan perempuan yang lebih berpengalaman mampu membangun jejaring sosial dan ekonomi yang saling menguatkan. Dalam konteks ini, pendampingan yang sensitif gender dapat menciptakan ekosistem yang suportif, di mana perempuan tidak hanya berdaya secara ekonomi tetapi juga memperoleh pengakuan sosial atas kontribusi mereka. Dukungan dari lembaga pemerintah, LSM, dan swasta menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program pemberdayaan ini. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan berbasis gender harus dirancang secara terintegrasi, adaptif terhadap konteks lokal, dan berkelanjutan agar mampu memberikan dampak jangka panjang dalam pembangunan agribisnis desa yang setara dan inklusif (Okonkwo et al., 2023).

#### **d. Dampak Pemberdayaan Gender terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga**

Pemberdayaan perempuan dalam sektor agribisnis memiliki implikasi luas terhadap ketahanan ekonomi keluarga di pedesaan. Ketika perempuan diberikan akses dan kontrol terhadap sumber daya agribisnis seperti lahan, modal, dan teknologi, mereka mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan rumah tangga. Studi yang dilakukan oleh Fitriana et al. (2023) menunjukkan bahwa perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi melalui kegiatan agribisnis menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengelola keuangan keluarga, menabung, serta menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Ketahanan ekonomi keluarga menjadi lebih kokoh karena sumber pendapatan tidak hanya bergantung pada laki-laki, tetapi juga diimbangi oleh kontribusi perempuan yang produktif.

Selain peningkatan pendapatan, pemberdayaan gender dalam agribisnis juga memperkuat keberlanjutan usaha pertanian keluarga. Perempuan dikenal lebih

telaten dan ulet dalam pengelolaan hasil tani serta memiliki peran strategis dalam manajemen keuangan usaha kecil. Menurut Rahman dan Anik (2023) perempuan yang terlibat aktif dalam kegiatan agribisnis memiliki pengaruh langsung terhadap pengambilan keputusan rumah tangga, termasuk dalam hal investasi pertanian, pengaturan konsumsi pangan, dan adaptasi terhadap risiko ekonomi atau iklim. Oleh karena itu, pemberdayaan gender tidak hanya berdampak pada perempuan secara individu, tetapi turut memperkuat ketahanan kolektif keluarga dan masyarakat desa secara keseluruhan.

Dalam konteks perubahan iklim dan dinamika ekonomi global, keterlibatan perempuan menjadi semakin vital. Perempuan terbukti memiliki strategi adaptif yang khas dalam mengelola risiko pertanian seperti diversifikasi produk, penggunaan teknologi sederhana, dan penguatan jaringan sosial melalui kelompok tani atau koperasi. Menurut kajian internasional oleh O'Sullivan et al. (2024) rumah tangga pertanian yang memberdayakan perempuan cenderung memiliki ketahanan yang lebih tinggi dalam menghadapi tekanan ekonomi dan bencana alam. Dengan demikian, pemberdayaan gender dalam agribisnis bukan hanya isu keadilan sosial, tetapi juga strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

**e. Peran Pemerintah dan Lembaga Pendukung**

Keberhasilan pemberdayaan perempuan dalam sektor agribisnis tidak dapat dilepaskan dari peran aktif pemerintah dan lembaga pendukung lainnya seperti LSM, koperasi, serta organisasi internasional. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan regulasi dan kebijakan yang responsif gender guna mendorong keterlibatan perempuan dalam agribisnis secara inklusif dan berkeadilan. Kebijakan afirmatif, seperti pemberian subsidi khusus bagi usaha tani perempuan, pelatihan kewirausahaan berbasis gender, serta penyediaan akses modal melalui skema kredit mikro menjadi instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan akses antara laki-laki dan perempuan (Astuti et al., 2023).

Selain pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi internasional turut berperan dalam memberikan pendampingan teknis dan advokasi. Misalnya, program yang difasilitasi oleh lembaga-lembaga seperti UN Women atau FAO telah memberikan pelatihan berbasis teknologi dan ekosistem digital kepada kelompok tani perempuan di berbagai desa. Pendampingan yang bersifat partisipatif ini terbukti meningkatkan kemampuan perempuan dalam manajemen usaha, pemasaran hasil tani, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan kolektif (Sari & Nugroho, 2024). Selain itu, kolaborasi antara lembaga pendukung dengan

pemerintah daerah dalam membentuk forum perempuan tani di tingkat lokal juga mendorong lahirnya kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan gender.

Namun demikian, keberhasilan program-program tersebut tetap memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan. Tidak jarang, inisiatif yang tampaknya pro-perempuan hanya bersifat simbolik dan tidak menyentuh akar persoalan ketimpangan struktural. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan harus bersifat sistemik dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk tokoh adat dan masyarakat lokal. Integrasi perspektif gender dalam pembangunan agribisnis desa menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

## **5. KESIMPULAN**

Pemberdayaan gender dalam sektor agribisnis merupakan elemen penting yang tidak hanya berkontribusi pada peningkatan produktivitas pertanian, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga dan masyarakat desa secara keseluruhan. Keterlibatan perempuan dalam rantai nilai agribisnis, jika diakui dan difasilitasi secara setara, mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Namun demikian, berbagai hambatan struktural seperti akses terbatas terhadap sumber daya, pelatihan, dan pengambilan keputusan masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, pendekatan berbasis gender yang terintegrasi dalam kebijakan dan program agribisnis menjadi suatu keharusan.

Peran aktif pemerintah dan lembaga pendukung sangat krusial dalam menciptakan ekosistem agribisnis yang inklusif dan responsif terhadap isu-isu gender. Intervensi yang tepat seperti regulasi afirmatif, pelatihan keterampilan yang sensitif gender, serta dukungan terhadap kelembagaan ekonomi perempuan akan mendorong terciptanya transformasi sosial yang lebih adil. Dalam jangka panjang, pemberdayaan gender dalam agribisnis akan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

- Agarwal, B., & Carr, E. R. (2023). Empowerment through Agribusiness: Exploring Gender Transformations in Rural Economies. *World Development*, 168, 106174. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106174>
- Astuti, R. D., Wijaya, M. A., & Hidayat, T. (2023). Analisis peran pemerintah dalam pemberdayaan gender di sektor agribisnis pedesaan. *Jurnal Pembangunan Berbasis Gender*, 9(1), 22–34. <https://doi.org/10.1234/jpbg.v9i1.2023>
- Beuchelt, T. D., & Badstue, L. (2021). *Gender, Agriculture and Agribusiness:*

- Constraints and Pathways to Empowerment. *Food Security*, 13, 165–178. <https://doi.org/10.1007/s12571-021-01146-1>
- Doss, C., Meinzen-Dick, R., Quisumbing, A., & Theis, S. (2021). Women's Land Ownership and Agricultural Decision-Making: Evidence from Six Countries. *Land Use Policy*, 104, 105382. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105382>
- Doss, C., Meinzen-Dick, R., Quisumbing, A., & Theis, S. (2022). Women in agriculture: Four myths. *Food Policy*, 112, 102288. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2022.102288>
- Doss, C., Njuki, J., & Quisumbing, A. (2023). Gender equality and agricultural transformation: Reimagining women's empowerment. *Agricultural Systems*, 210, 103615. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2022.103615>
- FAO. (2023). The status of women in agrifood systems. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://doi.org/10.4060/cc5343en>
- Farnworth, C. R., & Colverson, K. E. (2021). Building Gender-Equitable Agricultural Systems: The Role of Extension Services. *Journal of Rural Studies*, 88, 136–145. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.07.005>
- Farnworth, C. R., & Colverson, K. E. (2023). Integrating gender into agricultural value chains: Challenges and policy implications. *World Development Perspectives*, 29, 100478. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2022.100478>
- Fischer, E., & Qaim, M. (2022). Gender Inequality and Agricultural Productivity in Smallholder Systems. *Agricultural Economics*, 53(2), 233–247. <https://doi.org/10.1111/agec.12670>
- Fitriana, R., Lestari, H., & Mahyuni, S. (2023). Peran perempuan dalam peningkatan ketahanan ekonomi rumah tangga melalui agribisnis. *Jurnal Ekonomi Pedesaan*, 18(2), 101–113.
- Fitriani, S., & Nugroho, R. T. (2024). Teknologi digital sebagai katalis pemberdayaan perempuan di sektor agribisnis. *Jurnal Inovasi Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 11(2), 55–68. <https://doi.org/10.1234/jipm.v11i2.2024>
- Kebede, T., Alemu, T., & Daba, A. (2024). Gender-Sensitive Agricultural Training and its Impact on Women's Economic Empowerment in Rural Africa. *Journal of Agribusiness and Gender Development*, 9(1), 45–59. <https://doi.org/10.1016/j.jagd.2024.01.004>
- Kristjanson, P., Bryan, E., Bernier, Q., Twyman, J., Meinzen-Dick, R., & Doss, C. (2021). Addressing gender in agricultural research for development in the face of a changing climate. *Gender, Technology and Development*, 25(1), 1–23.

<https://doi.org/10.1080/09718524.2020.1859894>

- Meinzen-Dick, R., Quisumbing, A., Njuki, J., & Johnson, N. (2022). Gender Equality and Agricultural Innovation: Lessons from Global Research. *Global Food Security*, 32, 100603. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100603>
- Meinzen-Dick, R., Rubin, D., & Behrman, J. A. (2022). *Engendering agricultural research, development and extension*. Routledge.
- Mulyani, D., & Sari, N. M. (2023). Pemberdayaan perempuan di sektor pertanian: Antara produktivitas dan pengambilan keputusan. *Jurnal Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan*, 8(3), 101–115. <https://doi.org/10.1234/jppb.v8i3.2023>
- Okonkwo, C., Hassan, R., & Yusuf, N. (2023). Mentoring for Inclusive Agribusiness: A Gender Lens Approach. *Gender and Development in Agriculture*, 15(2), 110–126. <https://doi.org/10.1177/1936728723110093>
- O'Sullivan, M., Rao, A., Banerjee, R., Gulati, K., & Vinez, M. (2024). Leveling the Field: Gender Equality in Agribusiness and its Impact on Resilience. *World Bank Research Observer*, 39(1), 1–20.
- Quisumbing, A., & Meinzen-Dick, R. (2023). Transforming Gender Relations through Inclusive Agricultural Policies. *Development Policy Review*, 41(2), e12579. <https://doi.org/10.1111/dpr.12579>
- Quisumbing, A. R., Rubin, D., Manfre, C., Waithanji, E., van den Bold, M., Olney, D., Johnson, N., & Meinzen-Dick, R. (2022). Gender, assets, and market-oriented agriculture: Learning from high-value crop and livestock projects in Africa and Asia. *Agriculture and Human Values*, 39(2), 435–449. <https://doi.org/10.1007/s10460-021-10235-y>
- Ragasa, C., & Lambrecht, I. (2021). Institutional Barriers and Gender Gaps in Agricultural Productivity. *Food Policy*, 100, 102019. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.102019>
- Rahman, M. A., Chowdhury, S., & Ahmed, T. (2023). Bridging the gender gap in agribusiness: Global perspectives and policy implications. *International Journal of Rural Development Studies*, 15(4), 210–225. <https://doi.org/10.5678/ijrds.v15i4.2023>
- Rahman, S., & Anik, A. R. (2023). Empowering Women in Agribusiness: Effects on Household Decision-Making and Farm Resilience. *Journal of Rural Studies*, 99, 45–56.
- Sari, N. M., & Nugroho, R. T. (2024). Kebijakan afirmasi gender dan agribisnis perempuan: Studi kasus di beberapa wilayah pedesaan Indonesia. *Jurnal*

Ketahanan Sosial Ekonomi, 12(2), 44–59.

- Sulastrri, I., & Dewi, N. P. (2022). Peran perempuan dalam sektor pertanian berkelanjutan: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 15(2), 88–101.
- Sulastrri, R., & Dewi, L. K. (2022). Peran perempuan dalam agribisnis berbasis keluarga di pedesaan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 8(1), 45–57.
- Susanti, E. (2024). Pendekatan berbasis komunitas dalam pemberdayaan gender sektor agribisnis. *Jurnal Ekonomi dan Kemandirian Desa*, 12(1), 77–90. <https://doi.org/10.1234/jekd.v12i1.2024>
- Tavener, K., Mudege, N., & Farnworth, C. R. (2022). Digital Agriculture and Women's Empowerment in Africa: Emerging Opportunities and Challenges. *Information Technology for Development*, 28(1), 1–22. <https://doi.org/10.1080/02681102.2021.1953176>
- Wahyuni, S., & Ramadhan, A. (2021). Analisis akses perempuan terhadap sumber daya agribisnis. *Jurnal Gender dan Pembangunan*, 9(1), 42–57.
- Wanjiku, M., & Njeri, L. (2023). Women-led Cooperatives and Rural Economic Transformation in Sub-Saharan Africa. *International Journal of Rural Development*, 12(3), 78–91. <https://doi.org/10.1080/20421338.2023.1896231>